



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 026 /A/JA/ 09/2009

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TINDAK PIDANA KHUSUS TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pegawai Kejaksaan terutama peningkatan pengetahuan dan wawasan dengan spesialisasi bidang Tindak Pidana Khusus, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Khusus Tahun 2009;
 - bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Khusus Tahun 2009 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
 - bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;
 - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/A/JA/7/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2009 Nomor: SP.0035.0/006.01.0/-/2009, tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TINDAK PIDANA KHUSUS TAHUN 2009.

- PERTAMA** :
- Tempat dan penyelenggaraan Diklat
- Diklat diselenggarakan di Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
 - Penyelenggara Diklat adalah Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat

Kepala Pusat Diklat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Khusus Tahun 2009.

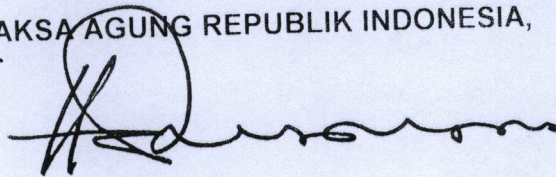
KESEMBILAN : Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.
4. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI di Jakarta.
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia.
8. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 September 2009

15/9 09.
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


HENDARMAN SUPANDJI

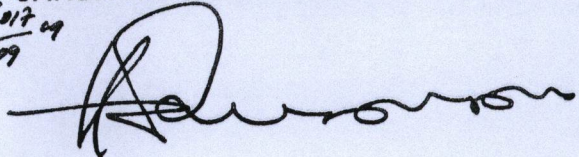
LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Kepala Pusat Diklat		15/9-09
			15/9-09
			15/9-09
5.	Penyidik		15/09 09
6.	Pengetik		15-9-09

**DRAFT KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 TINDAK PIDANA KHUSUS TAHUN 2009
 2 BULAN = 440 JAM PELAJARAN**

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAIKWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				JUM LAH
			TEORI	DISKU SI	PRAK TEK	UJIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KELOMPOK TINDAK PIDANA KHUSUS						
1	TUPOKSI Kejaksaa dalam penanganan TP Khusus	Struktural JAM PIDSUS	7	-	-	2	9
2	Teknik Penyelidikan dan Penyidikan TP Khusus	Struktural JAM PIDSUS	7	-	3	2	12
3	Pemberkasas TP Khusus		1	3	6	2	12
4	Teknik Pemaparan Perkara TP Khusus • Pembuatan Chart • Pembuatan Matrik • Ekspose	M. Yusuf, SH.MH	6	-	-	2	8
5	Penyusunan Surat Dakwaan	M. Yusuf, SH MH	6	-	10	2	18
6	Penyusunan Pendapat Jaksa PU atas Eksepsi Penasehat Hukum	Tarwo Hadi S, SH MH	3	-	6	2	11
7	Analisis Yurisprudensi Penting dalm Perkara TP Khusus	Prof. DR. Jur Andi Hamzah, SH	6	1	-	2	9
8	Pengungkapan Kejahatan TP Khusus yang dilakukan oleh Korporasi	Prof. DR. Jur Andi Hamzah, SH	7	-	-	2	9
9	Penanganan Perkara TP Khusus In Absentia	Hasan Madani, SH	7	-	-	2	9
10	Teknik Pembuktian dan Penyusunan Requistoir dalam Perkara TP Khusus - Teknik Pemeriksaan Alat Bukti - Analisis Pembuktian - Teknik Penyusunan Requisitoir	Adnan Paslyadja, SH	7	3	3	2	15
11	Upaya Hukum, Penyusunan Memori/ Kontara Memori: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Hasan Madani, SH	4	3	3	2	12
12	Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara TP Khusus		6	1	-	2	9
13	Kewenangan menangani Kasus (DATUN atau PIDSUS atau keduanya)	Struktural JAM PIDSUS	3	1	3	2	9
14	Penyelesaian perkara TP Khusus dengan mekanisme DATUN	Struktural JAM PIDSUS	3	1	3	2	9
II	TINDAK PIDANA KORUPSI						
1	Tindak Pidana Korupsi dalam UU No 3/1971, UU No 31/1999 dan UU No 30/2001.	Prof. Dr. Jur Andi Hamzah	7	3	-	2	12
2	Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pembangunan (Studi kasus)	BPKP	6	3	7	2	18
3	Tindak Pidana Korupsi dalam Bidang Perbankan dan Moneter (Studi kasus)	Ramelan, SH	6	3	7	2	18
4	Tindak Pidana Korupsi oleh Pelaku Bisnis (Studi Kasus)	Ramelan, SH	6	3	7	2	18
5	Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang & Jasa PP No 70 Tahun 2005 tentang perubahan Ketiga atas KEPPRES No.80 Tahun 2003	Joko Budiharjo, SH	6	3	9	3	18
Jumlah			104	28	67	39	238

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAIKWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
III	TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN						
1	Aspek Hukum dalam UU No.10/1995 serta peraturan pelaksanaanya	Nur Rohmat, SH., MH	4	3	-	2	9
2	Modus operandi, cara pengungkapan dan Analisis Yurisprudensi Penting dalam perkara TP Kepabeanan	Nur Rohmat, SH., MH	4	3	-	2	9
3	Studi Kasus TP. Kepabeanan	Nur Rohmat, SH., MH	-	-	9	-	9
IV	TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN						
1.	Aspek Hukum dalam UU No.16/2000 serta peraturan pelaksanaanya. TP Perpajakan	Ditjen Pajak	4	3	-	2	9
2.	Modus operandi cara pengungkapan dan Analisis Yurisprudensi Penting dalam perkara TP Perpajakan	RM. Soeripto, SH	3	3	-	-	6
3.	Studi Kasus TP Perpajakan	DR. Yudi Kristiana, SH., MH	-	-	7	2	9
V	TINDAK PIDANA HAM BERAT						
1.	Aspek Hukum dalam UU No.39/1999 tentang Hak Azasi Manusia dan UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM	Dir. HAM	7	3	-	2	12
2.	Studi Kasus TP HAM yang berat	Dir. HAM	-	-	10	2	12
VI	TINDAK PIDANA PERIKANAN						
1.	Aspek Hukum dalam UU No 31/2004 tentang TP Perikanan	Amin Birawa, SH	6	1	-	2	9
2.	Modus operandi cara pengungkapan dan Analisis Yurisprudensi Penting dalam perkara TP Perikanan	Arif Mulyawan, SH., MH	6	1	-	2	9
3.	Studi Kasus TP Perikanan	Tarwo Hadi S, SH., MH	-	-	7	2	9
VII	TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG						
1.	Aspek Hukum dalam UU No.15/2002 sebagaimana diubah dengan UU No.25/2003 tentang TP Pencucian Uang	Reda Mantovani, SH	6	1	-	2	9
2.	Modus operandi, cara pengungkapan dan Analisis Yurisprudensi penting dalam perkara TP Pencucian Uang	PPATK	6	1	-	2	9
	Jumlah		46	19	33	22	120

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAISWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Studi Kasus TP Pencucian Uang	Struktural PIDUM JAM	3	-	8	2	13
VIII KELOMPOK PENUNJANG							
1	Forensic Accounting	BPKP	6	1	-	2	9
2	Asset Tacing (Pelacakan Aset)	BPKP	6	1	-	2	9
3	Perkara Suap dan Tindak Pidana Korupsi	Ikhsan Kawanto, SH	6	-	-	-	6
4	PKL		-	-	36	-	36
IX KELOMPOK SIKAP, MENTAL, DAN PRILAKU DISIPLIN							
1	PBB	Tim Marinir TNI AL & Tim Pusdiklat	6	-	-	3	9
2	Out Bound	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran)	-	-	-	-	-
3	Pengamanan dan Penggunaan senjata api laras pendek/ laras panjang.	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran)	-	-	-	-	-
X CERAMAH							
1.	Ceramah KPK						
2.	Ceramah JAM PIDSUS						
3.	Ceramah KAPUSDIKLAT						
Jumlah			27	2	44	9	81
JUMLAH TOTAL			177	49	144	70	440

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 7/9/09


HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.			15/9-09
2.	Kapus Binas		15/9-09
3.	Kabid		15/9-09
4.	Kasubbid		15/9-09
5.	Pelaksana		15/09-09
6.	Pengetik		15-9-09